

## OPINI

# Indonesia di Ambang Krisis?

**P**residen Jokowi dalam Rapat Terbatas pada Rabu (4/9) mengemukakan kekesalannya mengenai 33 perusahaan yang memindahkan pabrik dari China. Menurut Bank Dunia dalam laporannya bulan lalu bertajuk *Global Economic Risks and Implications for Indonesia* menyatakan dalam periode Juni-Agustus 2019, terdapat 33 perusahaan terdaftar di China telah mengumumkan akan mendirikan atau memperluas produksi di luar negeri, antara lain 23 akan ke Vietnam, dan 10 sisanya akan ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand.

Bank Dunia mengungkap beberapa penghambat bagi asing masuk ke Indonesia. Misalnya, Indonesia terputus dari rantai pasokan global, ekspor tidak bersaing terkait dengan pengenaan tarif impor, kebijakan dalam peraturan yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah, lamanya proses relokasi, kepastian hukum dan keamanan serta masalah ketersediaan tenaga kerja berkeahlian tinggi.

Adangan ini berasal dari perlambatan ekonomi nasional dan perlambatan pertumbuhan perekonomian global. Bank Dunia (2019) menyatakan bahwa hal ini ditandai dengan titik api sumber krisis yang siap menyala seperti Brexit, ketegangan dagang Jepang-Korea, sanksi Iran dan perang bayangan dengan Israel, pemilu AS 2020, protes Hong Kong, restrukturisasi utang Argentina, dan juga krisis Khasmir.

Melirik data BPS, pada semester I 2019 pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) relatif stabil, yaitu 5,05% (yoy). Namun terjadi penurunan 4,35% dari Juni 2018 sebesar 5,27%, sementara inflasi terjadi 3,28%. Rasio Gini pada Maret 2019 sebesar 0,382 dan tingkat pengangguran terbuka pada Februari mencapai 5,01%.

Dari laman Bank Indonesia diketahui bahwa cadang-

an devisa sampai dengan 31 Agustus 2019 sebesar US\$126,44 miliar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik dibandingkan dengan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Dari sisi utang, berdasarkan data Kemenkeu pada *Laporan APBN Kita edisi Juli dan Agustus 2019*, total utang pemerintah Rp4.570,17 triliun (Juni 2019) dan Rp4.603,62 triliun (Juli 2019). Untuk posisi Juni, utang terdiri dari pinjaman Rp785,61 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp3.784,56 dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 29,56%. Untuk utang posisi Juli terdiri dari pinjaman Rp782,72 triliun dan SBN Rp3.820,90 triliun serta rasio utang terhadap PDB 29,51%.

Dalam RAPBN 2020 beserta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi ke DPR pada 16 Agustus diuraikan beberapa asumsi keuangan, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,1%, perkiraan nilai kurs Rp14.400 per dolar AS, bunga SBN 3 bulan 5,4%, harga minyak mentah US\$ 65 per barel, target *lifting* minyak 734.000 barel/hari, dan gas bumi 1,19 juta setara minyak per hari. Bisa dikatakan pemerintah optimistis menjalani 2020 dengan suasana kondusif dan bisa bertahan dari hadangan krisis ekonomi.

Kendati keadaan perekonomian nasional relatif stabil dan kondusif di tahun ini, 2020 perlu diwaspadai. Laporan Sengupta dan Seshadrinathan dari McKinsey & Global Company pada Juli lalu bertajuk *Signs of Stress in the Asian*

*Financial System*, terungkap bahwa korporasi menggunakan bagian dominan dari pendapatan untuk membayar utang mereka. Untuk Australia, China, Hong Kong, India, dan Indonesia, memiliki lebih dari 25% utang jangka panjang dengan *interest coverage ratio* (ICR) kurang dari 1,5%.

Khusus untuk India dan Indonesia sebagian besar perusahaan energi, industri dan utilitas dinyatakan menyusahkan, karena kemampuan mereka memutar balik kinerja dan membayar utang membutuhkan kerja lintas berbagai pemangku kepentingan, sehingga upaya pemulihan di sektor ini jauh lebih rumit. Apalagi

kualitas arus masuk modal ke Asia telah meningkat dengan pangsa investasi langsung asing, dari 27% pada 2007 menjadi 38% pada 2018.

Sengupta dan Seshadrinathan juga mengungkapkan, penyangga modal dalam sistem keuangan di seluruh Asia dapat di-*challenge* secara material, di

mana rasio modal di seluruh Asia sekitar 13%. Namun proporsi yang signifikan dari ekuitas dalam sistem bisa berisiko, karena besarnya utang jangka panjang yang dipikul korporasi yang tengah mengalami tekanan. Hal ini kerap dipicu struktur utang yang melampaui 60% dari ekuitas dalam sistem di 2017.

The McKinsey Global Institute/MGI (2018) juga melaporkan, pangsa aliran masuk keuangan global ke Asia melonjak dari sekitar 12% pada 2007 menjadi sekitar 36% pada 2018. Kata kuncinya adalah peningkatan arus masuk dan keterkaitan berkelanjutan

an terhadap keuangan global akan menghadirkan dua risiko. *Pertama*, ekonomi Asia sekali lagi berpotensi rentan terhadap guncangan eksternal. *Kedua*, setiap krisis yang berasal dari Asia dapat mengirim efek riak di seluruh dunia.

Dari penelitian Simatupang dan Sirait (2019) berjudul *The Credit Matter and the Myth Ten Yearly of Crisis: The Case of Indonesia* disebutkan bahwa secara 10 tahunan dalam kurun 1984-2018, dampak krisis keuangan 2008 di Indonesia tidak separah krisis keuangan Asia 1998. Dari analisis, tingkat inflasi pada 2008 tidak signifikan secara statistik dalam menggambarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode krisis keuangan Asia dan pasca krisis keuangan 2008.

Selain itu, mitos krisis 10 tahunan tidak terjadi, karena selama krisis keuangan dunia 2008 dan sesudahnya, penyerapan kredit secara signifikan mencerminkan pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia saat ini tidak dalam keadaan krisis dan ancaman krisis yang mengadang akan mampu ditangkis dengan beberapa aksi nyata di lapangan oleh pemangku kepentingan.

Dalam studi McKinsey (2019) tentang 'perusahaan tangguh' yang mampu menghasilkan pengembalian *quintile* atau 20% teratas pasca krisis keuangan global, disoroti bahwa korporasi harus menciptakan fleksibilitas finansial dan operasional, terutama transformasi digital dan berfokus pada peningkatan pendapatan yang konsisten jika ingin menang.

Semua pihak harus bergandeng tangan dalam menghadapi ancaman krisis. Kita harus sadari juga, tidak ada keputusan ekonomi tanpa keputusan politik. Tangkisan yang mujarab antara lain dengan menjaga kestabilan keamanan, jaminan hukum yang terprediksi, sinkronisasi aturan antara pusat dan daerah, dan keselarasan kebijakan Presiden dengan para pembantunya.



**BATARA M. SIMATUPANG**  
Lektor MM Indonesia  
Banking School